

**DETERMINAN TATA KELOLA SYARIAH TERHADAP *ISLAMIC SOCIAL REPORTING*
DISCLOSURE (STUDI EMPIRIS: SEBELUM DAN SETELAH PANDEMI COVID-19)**

Nur Azifah

Fakultas Ekonomi, nurazifah.sef@gmail.com, Universitas Gunadarma

ABSTRACT

This study aims to assess the determinant of sharia governance that impacts the disclosure of Islamic Social Reporting. This study is a quantitative study using financial statements of Islamic banks in the 2016-2020 period. The sample of this research is 6 Islamic Commercial Banks in Indonesia. The independent variables are sharia governance which proxied by the board commissioners size, the board directors size, the sharia supervisory board size and the audit committee size on the impact to Islamic Social Reporting disclosure in Indonesian Islamic banks from 2016 to 2020. The method used is content analysis and fixed effect panel regression. From the test results, all proxy variables of sharia governance significantly impact the level of ISR disclosure simultaneously. An interesting finding in this study is that DPS does not affect ISR disclosure due to the suboptimal performance of DPS. The role and involvement of the board of directors and audit committee are very important, so every Islamic banking needs to pay attention to these indicators to improve ISR disclosure performance in Islamic banking.

Keywords: Good Corporate Governance, Islamic Social Reporting, Sharia Bank

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai faktor-faktor sharia governance (SR) yang memberikan dampak terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dari laporan keuangan tahunan bank syariah periode 2016-2020. Sampel penelitian ini adalah 6 Bank Umum Syariah di Indonesia. Variabel independen menggunakan sharia governance yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran dewan pengawas syariah dan ukuran komite audit serta variabel dummy pandemi COVID-19 terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia periode 2016 hingga 2020. Metode yang digunakan adalah content analysis dan regresi data panel. Dari hasil pengujian, didapatkan bahwa secara simultan seluruh variabel proksi sharia governance memiliki dampak signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR. Sedangkan, dari uji parsial diketahui bahwa variabel ukuran dewan direksi, komite audit, dan pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Temuan menarik pada penelitian ini yakni tidak berpengaruhnya DPS terhadap pengungkapan ISR yang disebabkan masih kurang optimalnya kinerja DPS, kemudian peran serta keterlibatan dari dewan direksi dan komite audit ternyata sangat penting, sehingga setiap perbankan syariah perlu memerhatikan indikator-indikator tersebut guna meningkatkan kinerja pengungkapan ISR di Perbankan Syariah.

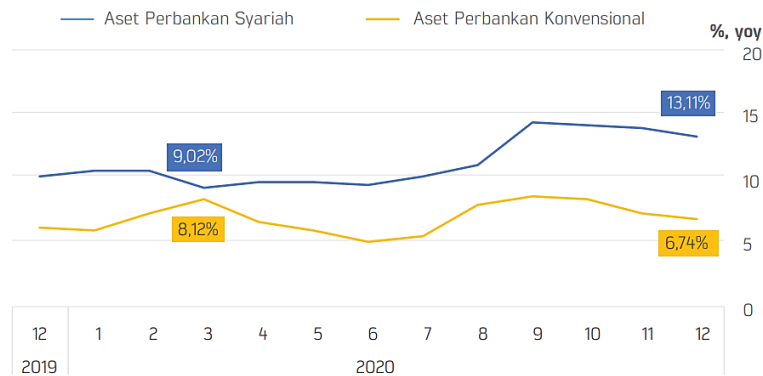
Kata Kunci: Shariah Governance, Islamic Social Reporting, Bank Syariah

1. PENDAHULUAN

Krisis yang diakibatkan oleh Pandemi COVID-19 tentu memberikan dampak yang cukup signifikan, terutama pada sektor ekonomi hingga pasar keuangan yang ada di seluruh dunia, termasuk juga di industri perbankan. Awalnya, Virus Sars-Cov 2019 merupakan wabah epidemi yang terjadi di Wuhan – China, namun tingkat penularan yang cukup masif menyebabkan virus tersebut menyebar ke seluruh dunia hingga statusnya berubah menjadi pandemi global [21]. Krisis COVID-19 ini diprediksi akan lebih berat jika dibandingkan *the great depression* 1929-1939 hingga krisis finansial global 2008, karena pandemi COVID-19 terdiri dari tiga sektor krisis yakni krisis ekonomi, keuangan dan sosial. Kondisi inipun memberi dampak yang cukup signifikan terhadap industri keuangan syariah, terutama sektor perbankan syariah. Namun, perbankan syariah hingga saat ini masih tetap bertahan dan bertumbuh dengan sangat baik walaupun menghadapi kondisi krisis apapun. Hal ini disebabkan, prinsip yang dipergunakan oleh perbankan syariah adalah prinsip yang bebas riba, bergerak di sektor riil, hingga menggunakan sistem tata kelola syariah yang

baik, sehingga industri perbankan syariah nasional tetap memiliki tren yang positif jika dibandingkan perbankan konvensional ketika menghadapi krisis akibat COVID-19.

Gambar 1. Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah Versus Perbankan Konvensional [17]



Pertumbuhan perbankan syariah yang positif ditunjukkan juga pada Gambar 1, dimana aset bank syariah walaupun pada kondisi krisis COVID-19 sepanjang tahun 2020 tetap memberikan performa peningkatan yang sangat baik sekali yakni sebesar 13,11%, sedangkan kinerja bank konvensional menurun sebesar 6,74% [17]. Keunggulan dari performa bank syariah ini jika diperbandingkan dengan bank konvensional tentunya tidak terlepas dari peran tata kelola *good governance* Bisnis Syariah (GGBS) [17]. Desain tata kelola *sharia governance* tentu fokus utamanya memastikan dipenuhinya prinsip kepatuhan syariah atau *sharia compliance* serta *sharia value* di setiap aktivitas operasional perbankan syariah, sehingga *sharia governance* menjadi suatu sistem dengan karakteristik unik dibandingkan tata kelola konvensional [20]. Pengungkapan tanggungjawab sosial atau disebut juga *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga tidak terlepas dari bagian yang dibahas pada *sharia governance*, hal tersebut diatur juga pada UU Pasal 1 ayat 3 Nomor 4 Tahun 2007 berkaitan dengan tanggungjawab sosial serta lingkungan [19]. Indeks *Islamic Social Responsibility* (ISR) inipun mengungkapkan seluruh aktivitas operasional bank syariah serta standar dari *sharia compliance* dimana transaksinya harus sesuai prinsip syariah, tidak ada *maysir*, *gharar*, *riba*, dan mengungkapkan juga sisi filantropi sosialnya seperti *zakat*, *infaq*, *shadaqah*, *waqaf*, dan *qardhul hasan*, sehingga penerapan serta pengungkapan dari desain tata kelola organisasi dipastikan sesuai dengan prinsip syariah [3].

Penelitian terdahulu pada Sunarto, dinyatakan bahwa total dewan direksi yang dimiliki suatu bank syariah memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan ISR, namun Dewan Pengawas Syariah serta komite audit dinyatakan tidak memengaruhi [25]. Hasil tersebut memberikan arti, ketika terjadi peningkatan jumlah direksi di bank syariah maka akan semakin meningkatkan kinerja dan produktifitas yang tentunya akan meningkatkan pula pengungkapan ISR-nya. Sementara peran DPS di perbankan syariah wajib mempunyai kompetensi yang mumpuni pada seluruh aktivitas perbankan syariah, serta komite audit diwajibkan juga memiliki kompetensi yang sesuai standar audit berbasis AAOIFI, sehingga pengungkapan ISR di Bank Syariah dapat diperoleh dengan optimal [25]; [3]. Namun kebalikan dari hasil yang diteliti oleh Pratiwi [18] memperlihatkan bahwa jumlah DPS memengaruhi pengungkapan ISR, yang berarti ketika terjadi peningkatan DPS pada suatu bank syariah dimana DPS memahami semua prinsip kepatuhan syariah, maka akan meningkatkan hasil pengungkapan aktivitas sosial di bank syariah menjadi semakin baik, hasil tersebut pun dikuatkan dari hasil beberapa peneliti terdahulu lainnya yang memberikan hasil yang sama [15]; [24]; [1]; [11].

Penelitian ini berkontribusi untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) di perbankan syariah yang dianalisis pada masa sebelum dan sesudah terjadinya krisis pandemi COVID-19 di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan perhatian perbankan syariah untuk meningkatkan kinerja pengungkapan tanggungjawab sosialnya pada laporan keuangan tahunan terutama di masa pandemi. Penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, dimana variabel yang digunakan seperti indikator *sharia governance* diprosikan dengan hasil skoring dari empat kategori yakni ukuran dewan komisaris, dewan direksi, dewan pengawas syariah (DPS), dan komite audit terhadap pengungkapan ISR, kemudian penggunaan variabel *dummy* krisis pandemi COVID-19 untuk mengetahui komparasi yang disebabkan dari penerapan *sharia governance* pada dua masa yakni masa sebelum terjadi pandemi dan masa setelah terjadinya krisis pandemi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Pada perusahaan, seringkali terdapat konflik kepentingan antar manajemen dan pemegang saham, yang mengutamakan kepentingan pribadi. Pengeluaran yang dapat menambah beban perusahaan, menurunkan laba usaha dan mengurangi dividen yang diterima, terkadang menimbulkan konflik, dan dapat diatasi dengan adanya pengawasan yang dapat menyetarakan kepentingan tersebut. Mekanisme pengawasan tersebut kemudian menimbulkan biaya, disebut juga dengan *agency cost*. Teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling [13] merupakan *conflict resolution hypothesis*, dimana perusahaan yang menggunakan kegiatan CSR bertujuan untuk mengurangi potensi dari konflik antara manajer serta pihak lainnya, termasuk juga pemangku kepentingan, sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai perusahaan dan mengurangi *agency cost*.

Sharia Governance

Berbeda dengan sistem tata kelola di perbankan konvensional dengan konsep umum *good corporate governance*, desain tata kelola *sharia governance* di perbankan syariah memiliki fungsi peran pengawasan kepatuhan syariah sehingga karakteristiknya lebih khas dibandingkan sistem GCG pada umumnya (Rama, 2014). Desain *sharia governance* yang baik, juga bertujuan agar bank syariah memiliki sistem pertahanan yang baik, dari segala bentuk tekanan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) baik internal maupun eksternal.

Islamic Social Reporting

Pelaporan *Islamic Social Reporting* adalah pelaporan pertanggungjawaban sosial perusahaan yang sesuai dengan *sharia value*. Indeks ISR berisikan kompilasi dari 42 item standar CSR, yang telah ditetapkan oleh AAOIFI. Haniffa [8] membentuk pengembangan laporan pertanggungjawaban sosial Islam menjadi enam kategori tema, yaitu tema pendanaan dan investasi, tema produk dan jasa, tema karyawan, tema masyarakat, dan tema lingkungan hidup. Berikut ini proksi tema indeks ISR, yaitu:

Tabel 1. Indikator *Islamic Social Reporting (ISR) Indeks* [8]; [9]; [10]; [15]

No	Tema
<i>A. Tema Pembiayaan dan Investasi</i>	
1	Pernyataan tentang kegiatan yang berkaitan dengan hal <i>riba</i>
2	Pengungkapan yang terkait dengan informasi <i>gharar</i> (ketidakpastian)
3	Pengelolaan dana zakat
4	Kebijakan atas penyisihan piutang tidak tertagih ataupun keterlambatan dalam pembayaran piutang
<i>B. Tema Produk dan layanan jasa</i>	
5	Pengembangan produk yang sesuai <i>sharia value</i>
6	Kehalalan dari produk
7	kualitas dan kemanan dari produk
8	Pelayanan konsumen atau program pengaduan pelanggan
<i>C. Tema Karyawan</i>	
9	Kebijakan terkait hari libur/ cuti, tunjangan, remunerasi atau bonus
10	Kesempatan pendidikan ataupun pelatihan kerja
11	Kesetaraan gender (hak yang sama antara pria dan wanita)
12	Perlindungan kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja
13	Lingkungan ataupun suasana kerja
14	Program keislaman seperti menjalankan ibadah bagi para karyawan
15	Memiliki tempat ibadah yang nyaman
16	Perekrutan karyawan yang memiliki keahlian tertentu/ khusus
17	Hubungan antara karyawan dengan pihak manajemen
<i>D. Tema Masyarakat</i>	

No	Tema
18	Kegiatan sosial pada masyarakat dan kegiatan filantropi
19	Pelaporan Wakaf
20	Pelaporan Qardhul Hasan
21	Bantuan sukarela dari kalangan karyawan
22	Bantuan Beasiswa sekolah
23	Magang/ Praktek Kerja Lapangan untuk para lulusan sekolah/ kuliah
24	Menjadi sponsor untuk pengembangan para pemuda
25	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tidak mampu (Fakir Miskin)
26	Kepedulian sosial terhadap anak-anak
27	Mensponsori kegiatan-kegiatan masyarakat
28	Memberikan bantuan kesehatan pada yang membutuhkan
<i>E. Tema Lingkungan</i>	
29	Konservasi pada lingkungan
30	Kegiatan untuk mengunrangi <i>global warming</i>
31	Perlindungan pada kepunahan flora dan fauna
32	Sosialisasi terkait lingkungan
33	Mendapatkan penghargaan terkait lingkungan serta audit lingkungan
34	Kebijakan terkait manajemen lingkungan
<i>F. Tema Tata Kelola Perusahaan</i>	
35	Status <i>sharia compliance</i> (kepatuhan prinsip syariah)
36	Pengungkapan struktur yang memiliki saham
37	Rincian detail Dewan Pengawas Syariah (nama dan tanggungjawab)
38	Jumlah rapat DPS yang terlaksana
39	Penerapan dari fungsi kepatuhan di bank
40	Pengungkapan terkait perkara-perkara hukum
41	Kebijakan kode etik profesi dan anti-korupsi
42	Kebijakan menggunakan standar akuntansi syariah internasional (AAOIFI)

Dewan Komisaris

Dalam prinsip GCG, salah satu elemen utamanya adalah dewan komisaris yang berfungsi sebagai pengambil kebijakan, ataupun keputusan di dalam perusahaan, serta mampu mendukung adanya sistem pengendalian internal yang baik. Penelitian [11] menyatakan bahwa ukuran dari dewan komisaris memiliki pengaruh dengan pengungkapan ISR, karena adanya pengawasan internal yang baik melalui komposisi dari dewan komisaris, maka tingkat pengungkapan ISR akan semakin luas. Berdasarkan *agency theory* yang dinyatakan Coller & Gregory [5], dimana pemegang saham akan memberikan wewenang tanggungjawab terhadap dewan komisaris untuk memonitor kegiatan manajemen perusahaan. Semakin besarnya ukuran dewan komisaris, maka usaha monitoring serta pengendalian dari CEO juga akan semakin efektif. Pengungkapan ISR juga akan semakin baik dengan adanya monitoring dari dewan komisaris, sehingga dapat meminimalisir informasi yang harus disembunyikan oleh manajemen perusahaan. Sebaliknya, menurut penelitian [19] mengungkapkan bahwa dewan komisaris tidak memiliki hubungan terhadap tingkat pengungkapan ISR di perbankan syariah, hal tersebut juga sejalan dengan yang diungkapkan pada penelitian [4]; [22]. Karena apabila terdapat informasi yang tidak menguntungkan kemudian dilaporkan, akan berdampak pada keputusan berinvestasi para pemegang saham [22].

H1. *Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting sebelum dan setelah pandemi COVID-19*

Dewan Direksi

Setiap direksi memiliki tanggungjawab secara penuh dalam mengurus kepentingan perusahaan sesuai tujuan perusahaan, sehingga direksi memiliki kewajiban untuk mempersiapkan rencana dalam jangka

panjang, jangka pendek serta rencana strategis lainnya yang isinya memuat tujuan serta sasaran perusahaan. Setiap direksi juga tidak diperbolehkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS ataupun pejabat eksekutif lainnya, hal ini agar pelaksanaan tugas, tanggungjawab serta kewenangan dapat dijalankan dengan baik. Pada peraturan OJK disebutkan bahwa setiap bank wajib mempunyai dewan direksi paling sedikit 3 orang dan dipimpin oleh direktur utama atau presiden direktur. Dewan direksi juga memiliki tanggungjawab dari beberapa fungsi manajemen tanpa harus dilibatkan dalam manajemen operasional perbankan. Penelitian Pratiwi [8]) membuktikan bahwa adanya pengaruh positif dewan direksi terhadap tingkat penungkapan tanggungjawab sosial, hal tersebut dinyatakan juga oleh penelitian [15]; [23]; [24], karena semakin banyaknya jumlah direksi yang terdapat pada bank syariah maka akan memiliki dampak terhadap pemberian tanggung jawab serta tugas dalam pelaksanaan kebijakan perbankan, termasuk juga pengungkapan tanggung jawab sosial (ISR). Pada teori agensi yang dikemukakan Coller & Gregory [5], menguatkan bahwa dengan adanya monitoring serta pengawasan yang cukup ketat dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, maka akan mengoptimalkan pengungkapan ISR di perbankan syariah dengan baik serta meminimalisir *asymmetric information*.

H2. Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting sebelum dan setelah pandemi COVID-19

Dewan Pengawas Syariah

Elemen yang paling penting dalam penerapan *sharia governance* adalah terdapat dewan pengawas syariah (DPS), sebagai pengawas internal perbankan syariah terhadap kepatuhan menjalankan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut juga yang membuat peran DPS sangat penting dalam pengungkapan ISR di perbankan syariah, karena termasuk ke dalam salah satu item ISR dengan tema tata kelola perusahaan yang sesuai dengan nilai syariah. Penelitian [6]; [11] ditemukan bahwa *sharia governance* memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pengungkapan ISR, dimana jumlah DPS mempengaruhi level pengungkapan. Semakin banyak DPS yang terdapat di perbankan syariah, maka akan meningkatkan pengungkapan informasi dengan melakukan perbandingan pelaporan perusahaan, untuk mendapatkan pelaporan yang terbaik. Teori agensi yang dijelaskan oleh Coller & Gregory [5], menyebutkan bahwa monitoring yang baik dapat meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga dengan adanya DPS di perbankan syariah dapat meningkatkan pengawasan ISR khususnya pada kegiatan yang berdasarkan prinsip syariah, apakah sudah memenuhi prinsip *sharia compliance* atau belum. Sebaliknya, penelitian [3] menunjukkan bahwa jumlah DPS tidak mempengaruhi pengungkapan ISR, hal ini dapat disebabkan karena perbedaan pandangan penelitian. Namun di Indonesia, DPS diperbolehkan untuk memiliki rangkap jabatan di perbankan syariah, IKNB syariah bahkan merangkap sebagai anggota DSN-MUI. Hal tersebut disebabkan belum adanya pengaturan yang jelas dari Bank Indonesia, terkait perangkapan jabatan DPS di institusi keuangan syariah [25].

H3. Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting sebelum dan setelah pandemi COVID-19

Komite Audit

Tugas dari komite audit yaitu untuk dapat memastikan bahwasanya struktur pengendalian dalam perusahaan telah dilaksanakan dengan baik, sehingga komite audit berhubungan langsung dengan komisaris dan memiliki kedudukan dibawah dewan komisaris. Penelitian [12]; [8]; [19] mengungkapkan bahwa komite audit memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan ISR, hal tersebut karena tanggungjawabnya untuk memastikan seluruh standar serta kebijaksanaan keuangan di bank syariah telah terpenuhi, dan melakukan verifikasi kembali terhadap laporan keuangan, apakah sudah sesuai dengan standar pelaporan syariah atau belum. Berdasarkan dari *agency theory*, para prinsipal akan berupaya mencari informasi untuk memastikan terkait tanggungjawab agen terhadap kepemilikan perusahaan. Komite audit memiliki tanggungjawab terhadap laporan keuangan, tata kelola, serta pengawasan perusahaan, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi para prinsipal. Prinsipal mengukur tingkat keberhasilan yang didapatkan dari usaha agen berdasarkan informasi yang diperoleh. *Agency cost* yang dikeluarkan oleh perusahaan juga dapat berkurang sejalan dengan pengawasan yang cukup ketat dilaksanakan komite audit [12]. Komite audit juga menilai kesesuaian pelaporan keuangan tahunan, pelaporan auditor, kewajaran biaya yang dikeluarkan serta mutu pelayanan sesuai yang telah dianjurkan oleh auditor eksternal [19]. Komite audit juga harus selalu memastikan bahwa pelaporan keuangan disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, standar akuntansi syariah, standar audit yang telah ditetapkan, serta menindaklanjuti temuan hasil audit yang telah dilaksanakan pihak manajemen [25]. Penelitian [19] menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif, dengan tingkat pengungkapan ISR di perbankan syariah.

H4. Ukuran Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting sebelum dan setelah pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 (Dummy Variable)

Pandemi COVID-19 menyebabkan krisis yang lebih besar dampaknya dibandingkan krisis sebelumnya, karena tidak hanya berdampak di sektor ekonomi dan keuangan saja, namun juga krisis di sektor kesehatan dan sosial. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, pengeluaran sosial pada perbankan syariah seharusnya lebih difokuskan dalam bentuk program *charity*, dalam bentuk bantuan pertolongan kepada masyarakat dan tenaga kesehatan yang terpapar virus COVID-19, masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), serta *qardh hasan* untuk para UMKM yang terdampak pandemi [2]. Sehingga tujuan adanya *Islamic Social Responsibility* pada perbankan syariah dapat tercapai, yakni memberikan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.

H5. *Pandemic COVID-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting*

3. METODOLOGI PENELITIAN

Bank Umum Syariah di Indonesia sebanyak 14 Bank Syariah, dimana pada penelitian ini hanya menggunakan *sample* 6 Bank Umum Syariah, dengan proses pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Syarat pengambilan sampel adalah Bank Syariah yang termasuk BUMN, Bank Syariah pertama di Indonesia dan Bank Syariah yang mempublikasikan laporan keuangannya dari tahun 2016-2020, sehingga disimpulkan sampel pada penelitian ini adalah PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia, PT Maybank Syariah dan PT Bank Mega Syariah. Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasi pada situs masing-masing Bank Syariah periode 2016-2020. Pendekatan kualitatif dengan asosiatif kausal digunakan pada penelitian yakni berupa teknik analisis dokumen atau *content analysis*. Selain pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengujian model menggunakan regresi data panel dengan dummy (*Least Square Dummy Variables*) dan diolah dengan *software* E-views versi 11.

Penelitian ini menggunakan model ekonometrik *Least Square Dummy Variable* (LSDV), yaitu:

$$ISR_{i,t} = \alpha_1 + \beta_1 UK_KOM_{it} + \beta_2 UK_DIR_{it} + \beta_3 UK_DPS_{it} + \beta_4 KOM_AUD_{it} + \gamma_1 DUMCOV_{it} + \gamma_2 DUMCOV(UK_KOM)_{it} + \gamma_3 DUMCOV(UK_DIR)_{it} + \gamma_4 DUMCOV(KOM_AUD)_{it}$$

Keterangan:

- ISR = *Islamic Social Reporting Index* atau Indeks Pengungkapan Sosial Islam
- UK_KOM = Ukuran Dewan Komisaris
- UK_DIR = Ukuran Dewan Direksi
- UK_DPS = Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- KOM_AUD = Ukuran Komite Audit
- DUMCOV = Variabel *Dummy* Pandemi COVID-19

Penelitian ini menggunakan variabel independen *sharia governance* yang diprosikan dengan ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran dewan pengawas syariah, dan ukuran komite audit. Sedangkan, variabel dummy yang digunakan adalah pandemi COVID-19 untuk menganalisis dampak dan kondisi *sharia governance* terhadap pengungkapan ISR sebelum dan setelah terjadi pandemi COVID-19. Variabel dummy dinilai dengan teknik *scoring* dimana bernilai 0 apabila berada di tahun sebelum terjadi pandemi, dan bernilai 1 apabila berada di tahun setelah pandemi terjadi. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah *Islamic Social Reporting* (ISR) indeks, dimana ada sekitar 40 item pengungkapan yang sesuai dengan *sharia compliance* AAOIFI [25]; [19]; [12]; [3]; [8]. Pengukuran pada ISR indeks menggunakan teknik *scoring* dimana jika perusahaan mengungkapkan *item* tersebut maka akan diberi nilai 1 dan sebaliknya jika tidak ada pengungkapan maka diberikan nilai 0. Rumus ISR indeks adalah sebagai berikut:

$$ISR = \frac{\text{Total item pengungkapan ISR}}{\text{Total indeks pengungkapan ISR}} \times 100\%$$

a. Regresi Data Panel – Pooled Data

Data *panel* merupakan data gabungan (*panel*) dari *time series* dan *cross-section*, yang meliputi banyak periode dan banyak objek atau individunya [7]. Data akan diolah menggunakan tiga metode estimasi data panel yaitu uji *chow*, uji *hausman* dan uji *lagrange multiplier (LM)*. *Common Effect Model (CEM)* adalah teknik paling sederhana dalam uji regresi data panel, karena hanya menggabungkan data *cross-section* dan *time series*, dengan mengabaikan perbedaan antar individu dan antar waktu. *Fixed Effect Model (FEM)* atau seringkali disebut *Least Square Dummy Variable (LSDV)*, karena menggunakan *dummy*, untuk mengetahui perbedaan dari intersep antar individu. Model estimasi REM adalah model yang mengestimasi *error term*, yang saling berpengaruh antar individu dan juga antar waktu [7].

b. Uji Hipotesis

Pengujian yang digunakan untuk menjawab hipotesis peneliti ini adalah uji simultan *F-Test*, uji parsial *T-Test* serta uji koefisien determinansi (R^2) [7]. Uji simultan digunakan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen terhadap dependen, sedangkan uji parsial menguji hubungan dari setiap variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian diukur dengan tingkat signifikansi 5%, jika nilai probabilitas < 5% maka memiliki pengaruh signifikan dan jika tidak, maka sebaliknya tidak berpengaruh. Uji Koefisien determinansi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen, yang dapat menjelaskan serta memprediksi variasi dari variabel dependen [7].

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Regresi Data Panel Dengan *Least Square Dummy Variables (LSDV)*

Fixed effect model yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pembobotan *cross-section weight* dengan parameter *white cross-section*, agar mengurangi heterogenitas *cross-section* dan memberikan interpretasi hasil yang lebih baik terhadap penelitian ini. Berikut ini hasil pengujian menggunakan *Fixed Effect Model* dengan *Least Square Dummy Variables (LSDV)*, yaitu:

Tabel 4. Hasil Pengujian *Fixed Effect Model*

<i>Dependent</i>	<i>ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR)</i>		
<i>Independent Variables</i>	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
UK_KOM	-0.006678	-0.859947	0.4034
UK_DIR	-0.003226	-2.722977	0.0157**
UK_DPS	-0.001119	-0.921644	0.3713
KOM_AUD	-0.004520	-3.166623	0.0064**
DUMCOV	-0.105486	-6.470900	0.0000***
DUMCOV*UK_KOM	0.008698	1.125734	0.2780
DUMCOV*UK_DIR	0.001441	-0.537767	0.5986
DUMCOV*UK_DPS	0.012751	5.401137	0.0001***
DUMCOV*KOM_AUD	0.008542	4.468037	0.0005**
<i>R-squared</i>	0.997245		
<i>Adjusted R-squared</i>	0.994674		
<i>F-statistic</i>	387.8617		
<i>Prob (F-statistic)</i>	0.000000***		

* significant at $\alpha = 10\%$; **significant at $\alpha = 5\%$; ***significant at $\alpha = 1\%$

Persamaan regresi yang dibuat berdasarkan hasil estimasi tabel 5, yaitu:

$$ISR = - 0.006678 C - 0.003226 UK_KOM - 0.001119 UK_DIR - 0.004520 UK_DPS - 0.105486 KOM_AUD - 0.105486 DUMCOV + 0.008698 DUMCOV (UK_KOM) + 0.001441 DUMCOV (UK_DIR) + 0.012751 DUMCOV (UK_DPS) + 0.008542 DUMCOV (KOM_AUD) + \epsilon$$

Berdasarkan hasil persamaan tersebut, diketahui apabila jumlah pada variabel ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran DPS, ukuran komite audit dan pandemi COVID-19 adalah konstan ataupun tetap, maka pengungkapan ISR akan bertambah sebesar -0.006678 . sedangkan, variabel ukuran komisaris, ukuran direksi, ukuran DPS, ukuran komite audit dan pandemi COVID-19 memiliki hubungan negatif terhadap pengungkapan ISR. Hasil tersebut diketahui bahwa apabila komposisi *sharia governance* diperbanyak dan semakin tingginya kasus pandemi COVID-19, maka tingkat pengungkapan ISR akan semakin rendah, karena krisis pandemi memberikan dampak terhadap penurunan kinerja dan pendapatan perbankan syariah, sehingga akan mengalami kesulitan dalam hal penyaluran sosial, dan berdampak terhadap tingkat pengungkapan ISR. Hasil pengujian koefisien determinansi, dimana nilai *R-Squared* sebesar 0.997245 yang artinya 99% variansi variabel pengungkapan ISR bisa dijelaskan dari kelima

variabel independen *sharia governance* dan pandemi COVID-19, sementara 1% lainnya dijelaskan dalam variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan serangkaian hasil uji regresi data panel, berikut ini ringkasan dari hasil penelitian ini.

Tabel 5. Resume Hasil Penelitian

Variabel	Hasil Uji-T	Hasil Uji-F
Ukuran Dewan Komisaris	Tidak Berpengaruh (-)	
Ukuran Dewan Direksi	Berpengaruh (-)	
Ukuran Dewan Pengawas syariah	Tidak Berpengaruh (-)	
Ukuran Komite Audit	Berpengaruh (-)	
Pandemi COVID-19	Berpengaruh (-)	Berpengaruh
COVID-19 * Ukuran Komisaris	Tidak Berpengaruh (+)	
COVID-19 * Ukuran Direksi	Tidak Berpengaruh (+)	
COVID-19 * Ukuran DPS	Berpengaruh (+)	
COVID-19 * Ukuran Komite Audit	Berpengaruh (+)	

Ukuran Dewan Komisaris Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Sebelum Dan Setelah Pandemi COVID-19

Variabel ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Koefisien ukuran dewan komisaris adalah -0.006678 yang menandakan hubungan negatif, antara jumlah dewan komisaris terhadap ISR. Sementara koefisien ukuran dewan komisaris di masa pandemi COVID-19 sebesar 0.008698 yang menandakan hubungan positif, dengan kata lain jumlah dewan komisaris di masa sebelum dan setelah pandemi COVID-19 sebagian besar mengalami peningkatan. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian [11] dan [14] yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris akan berpengaruh dengan tingkat pengungkapan ISR.

Hasil penelitian ini menyatakan sebaliknya dan sejalan dengan penelitian [4]; [19]; [22] yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah, karena dewan komisaris hanya melaksanakan pengawasan secara umum tanpa memerhatikan dari sisi *sharia value*. Ukuran dewan komisaris yang tidak dipengaruhi oleh kondisi krisis pandemi COVID-19, karena didapatkan adanya peningkatan jumlah dewan komisaris di 5 Bank Syariah yang diobservasi pada penelitian ini, sedangkan hanya PT Bank Mega Syariah yang mengalami penurunan jumlah dewan komisaris pada tahun 2020. Adanya hubungan negatif, juga tidak selaras dengan teori agensi yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka dapat meningkatkan pengungkapan ISR, pada penelitian ini ditemukan hal sebaliknya, bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka akan menurunkan tingkat pengungkapan ISR, karena tidak efektifnya pengendalian internal. Hal ini dikarenakan dewan komisaris merupakan pengambil kebijakan dan keputusan di dalam perusahaan, sehingga apabila jumlah dewan komisaris yang terlalu banyak, akan menyebabkan konflik internal dan meningkatkan *asymmetric information*, karena setiap komisaris memiliki seluruh informasi internal. Sehingga hasil tersebut menunjukkan belum maksimalnya kinerja dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dari sisi pengawasan serta pelaporan tanggungjawab sosial ISR di perbankan syariah [4]; [19]; [22]; [8].

Ukuran Dewan Direksi Berpengaruh Signifikan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Sebelum Dan Setelah Pandemi COVID-19

Variabel ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR, namun kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini tidak mempengaruhi besar kecilnya ukuran dewan direksi. Ukuran dewan direksi juga memiliki koefisien negatif sebesar -0.003226, yang berarti terdapat hubungan negatif antara dewan direksi terhadap pengungkapan ISR, sementara koefisien ukuran dewan direksi di masa sebelum dan setelah pandemi COVID-19 memiliki hubungan positif sebesar 0.001441, dengan kata lain jumlah dewan direksi sebagian besar mengalami peningkatan.

Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, dimana jumlah dewan direksi memengaruhi tingkat pengungkapan ISR di perbankan syariah, karena dewan direksi memiliki peran utama dalam hal pengawasan perbankan syariah terutama dalam hal peningkatan kinerja, keberlangsungan usaha, serta

kebijakan yang ditetapkan [15]; [16]; [14]; [23]; [24]; [25]; [18]. Adanya hubungan negatif, dapat diartikan bahwa adanya peningkatan jumlah dewan direksi, maka akan menurunkan tingkat pengungkapan ISR di perbankan syariah, hal ini disebabkan apabila terlalu banyak para pemangku kepentingan akan meningkatkan *asymetric information* dan konflik internal, apabila dewan direksi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal tersebut tidak sejalan dengan *agency theory* yang menyatakan semakin besar ukuran dewan direksi maka akan memberikan pengendalian internal yang efektif, sementara penelitian ini membuktikan hal yang sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan, besarnya jumlah direksi juga harus disesuaikan dengan posisi tertentu yang dikuasai oleh setiap direksi, agar dapat lebih fokus dalam upaya peningkatan kinerja perbankan syariah, terutama dalam hal pengungkapan tanggungjawab sosial Islam (ISR). Ukuran dewan direksi yang tidak dipengaruhi oleh kondisi krisis pandemi COVID-19, mengindikasikan bahwa besar kecilnya jumlah direksi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan internal para pemangku kepentingan, sehingga untuk dapat meningkatkan pengungkapan ISR, dewan direksi harus meningkatkan kompetensi dan kinerjanya dalam hal pengawasan internal di perbankan syariah.

Ukuran Dewan Pengawas Syariah Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Sebelum Dan Setelah Pandemi COVID-19

Ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan ISR disebabkan adanya pengaruh dari kondisi pandemi COVID-19. Adanya hubungan negatif antara ukuran DPS dengan pengungkapan ISR, menandakan apabila semakin besarnya jumlah DPS di perbankan syariah, maka akan mengakibatkan penurunan pengungkapan ISR. Hasil tersebut tidak sejalan dengan *agency theory*, dimana dinyatakan bahwa semakin besar ukuran DPS, maka akan meningkatkan pengungkapan pelaporan ISR perbankan syariah, namun penelitian ini menyatakan hal sebaliknya.

Dari hasil tersebut, maka penelitian ini juga menolak pernyataan dari peneliti terdahulu yang menyatakan bahwa jumlah DPS berpengaruh terhadap pengungkapan ISR karena DPS berfungsi sebagai pengawas yang mendampingi dewan komisaris untuk memantau segala kegiatan operasional perbankan agar sesuai dengan *sharia compliance* [15]; [16]; [24]; [1]; [11]; [8]. Namun, penelitian ini menyatakan sebaliknya, sejalan dengan penelitian [25]; [3] bahwa jumlah DPS tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR disebabkan karena adanya anggota DPS yang memiliki rangkap jabatan di beberapa bank syariah dan institusi syariah lainnya, karena belum ada regulasi yang mengatur tentang kerangkapan jabatan DPS. Sehingga menyebabkan kurang maksimalnya peran DPS dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawab dalam hal pengawasan *sharia compliance*, utamanya dalam kegiatan penyaluran dana sosial yang diakui pada pelaporan ISR di bank syariah tersebut. Peningkatan ukuran DPS juga dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19, karena pada kondisi perbankan syariah di masa pandemi mengalami penurunan kinerja dan pendapatan, sehingga pengeluaran untuk tanggungjawab sosial Islam harus diawasi dengan baik agar kegiatan operasional yang melibatkan kesesuaian dengan prinsip syariah dapat terlaksana dengan baik dan sesuai kepatuhan syariah.

Jumlah DPS yang terlalu banyak dan rangkap jabatan, membuat kinerja DPS tidak efisien, sehingga tidak dapat meningkatkan pengungkapan pelaporan tanggungjawab sosial Islam dengan baik. Sehingga kuantitas DPS tidak memengaruhi pelaporan ISR, karena kualitas dari DPS lebih diutamakan dibandingkan kuantitas, DPS yang memiliki latar belakang tidak hanya seputar ilmu fiqh namun juga memahami keuangan, manajemen, akuntansi dan ekonomi menjadi nilai tambah dalam hal peningkatan kinerja pengawasan laporan tanggungjawab sosial Islam di perbankan syariah. Jumlah DPS terbanyak terdapat di PT Maybank Syariah dengan 4 anggota DPS, sementara untuk bank syariah lainnya jumlah DPS berkisar antara 2-3 dewan pengawas syariah.

Ukuran Komite Audit Berpengaruh Signifikan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Sebelum Dan Setelah Pandemi COVID-19

Komite audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR sehingga semakin banyak jumlah komite audit dapat meningkatkan pelaporan ISR dengan lebih baik lagi. Ukuran komite audit juga dipengaruhi pada kondisi sebelum dan setelah terjadinya pandemi COVID-19 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0001 lebih kecil dari 5% *level significant*. Komite audit memiliki tugas untuk memastikan bahwa pengendalian internal pada perbankan telah dilakukan dengan sangat baik, terutama pengawasan kualitas pengungkapan informasi [12].

Penelitian ini sejalan dengan pernyataan penelitian [12] dan [19] yang menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan ISR karena peran serta fungsi komite audit dalam

menguji (*examination*) penyajian pada laporan keuangan yang *fair* sesuai standar akuntansi syariah yang berlaku dan standar AAOIFI. Sehingga praktik yang dilaksanakan oleh komite audit terhadap aktivitas sosial yang dijalankan perbankan syariah selalu dipastikan kesesuaiannya terhadap *sharia compliance*, terutama pada pengungkapan laporan tanggung jawab sosial di bank syariah (ISR). Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan pernyataan penelitian [12], dimana menyatakan bahwa besar kecilnya ukuran komite tidak memengaruhi kualitas pengungkapan informasi perusahaan karena komite audit lebih memiliki tanggungjawab utama pada bagian tata kelola perusahaan serta penanggungjawab bidang laporan keuangan daripada bertanggungjawab dalam pengungkapan informasi sosial. Sehingga menurut penelitian [12] bahwa banyaknya komite audit tidak menjamin bahwa pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan kecurangan pengungkapan tanggungjawab sosial akan terlaksana dengan efektif. Penelitian ini menyatakan hal sebaliknya, bahkan selaras dengan pernyataan *agency theory*, dimana semakin banyak kuantitas komite audit yang bertanggungjawab dan kompeten terhadap pelaporan keuangan, maka akan meningkatkan pengungkapan pelaporan ISR di perbankan syariah. Hasil pada penelitian ini dapat menjadi rekomendasi dan pertimbangan perbankan syariah untuk meningkatkan jumlah komite auditnya, dalam rangka meningkatkan pelaporan tanggungjawab sosial Islam.

Pandemic COVID-19 Berpengaruh Signifikan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting

Pandemi COVID-19 mempunyai hubungan negatif terhadap tingkat pengungkapan ISR, dibuktikan dengan nilai dari koefisien regresi -0.105486, dengan kata lain ketika kasus pandemi meningkat maka akan menurunkan tingkat pengungkapan ISR. Dampak pandemi COVID-19 juga sangat dirasakan oleh seluruh industri keuangan termasuk perbankan, penurunan dari beberapa kinerja internal terutama pembiayaan dan pendapatan, berdampak sangat besar menyebabkan kerugian pada perbankan syariah. Sehingga, ketika perbankan syariah mengalami penurunan kinerja, maka tentu akan menurunkan tingkat pengungkapan ISR, karena menurunnya penyaluran dana sosial pada perbankan syariah. Kondisi pandemi COVID-19 juga menyebabkan beberapa perbankan melakukan konversi, *merger* dan *spin-off*, dengan tujuan mempertahankan kinerja perbankan syariah di masa krisis pandemi saat ini. Pada tahun 2021, terdapat 3 Bank Umum Syariah BUMN yang *merger* yaitu Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI Syariah menjadi satu kesatuan yaitu Bank Syariah Indonesia. Kemudian, perbankan syariah yang melakukan konversi dari Bank Umum Konvensional adalah Bank Aceh Syariah dan Bank NTB Syariah. Diharapkan Unit Usaha Syariah yang ada saat ini juga melakukan *spin off* ataupun pemisahan, untuk dapat mengoptimalkan kinerjanya pada industri perbankan syariah, sehingga dapat lebih meningkatkan *market share* bank syariah di masa pandemi COVID-19.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian menggunakan pengujian dengan regresi data panel *fixed effect model Least Square Dummy Variable* (FEM LSDV), dimana secara simultan seluruh variabel independen seperti ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran dewan pengawas syariah, ukuran komite audit dan dummy pandemi COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR. Sedangkan secara uji parsial, hanya variabel ukuran dewan direksi, ukuran komite audit dan pandemi COVID-19 yang mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR pada perbankan syariah, hal ini sejalan dengan pernyataan pada *agency theory* dimana besaran kuantitas pada seluruh jajaran dewan direksi dan komite audit, dapat mengoptimalkan pengungkapan ISR dengan baik. Sehingga bank syariah perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan jumlah dewan direksi dan komite audit yang memiliki kompetensi dan kinerja yang baik, agar dapat memberikan pelaporan pengungkapan tanggungjawab sosial yang lebih baik lagi. Tidak berpengaruhnya ukuran dewan pengawas syariah (DPS), diakibatkan masih kurang efisiennya kinerja DPS dalam hal pengawasan tanggungjawab sosial Islam di bank syariah. Dimana, jumlah DPS juga dipengaruhi oleh dampak dari Pandemi COVID-19, sehingga ketika bank syariah meningkatkan jumlah DPS-nya yang memiliki kompetensi tidak hanya dalam ilmu fiqh namun juga memahami keuangan, moneter dan manajemen, terutama memiliki keahlian dalam mengantisipasi risiko yang ditimbulkan oleh dampak pandemi COVID-19, maka akan dapat meningkatkan pengungkapan informasi perbankan terutama dalam hal pelaporan ISR.

Implikasi penelitian ini untuk mengetahui determinan apa saja dari proksi *sharia governance* yang mampu berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* terutama pada kondisi sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para regulator untuk memberikan kebijakan terkait regulasi dan perbankan syariah untuk dapat meningkatkan performa pelaporan tanggungjawab sosialnya dari sisi *sharia governance*. Penelitian ini terbatas pada bank syariah di Indonesia, sehingga harapannya pada penelitian selanjutnya menggunakan

komparasi dengan bank syariah di negara lain ataupun mengganti institusi perbankan syariah dengan lembaga non-bank syariah seperti IKNB syariah ataupun lembaga keuangan mikro syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adierto, C. P., & Chariri, A. (2013). Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Kasus Pada Bank Syariah di Asia). *Diponegoro Journal of Accounting*, pp. 168-182.
- [2] Amelia, A., & Yusof, N. (2020). Peran Perbankan Syariah Dalam Melaksanakan Corporate Social Responsibility Di Masa COVID-19. *IMRA: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 2, pp. 96-104. <http://dx.doi.org/10.31958/imara.v4i2.2332>.
- [3] Anamah, S., & Rusli, D. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2019. *Artikel Repository Sekolah Tinggi Ilmu Ekonom Indonesia*, pp. 1-21.
- [4] Aprianingsih, A., & Yushita, A. N. (2016). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governanve, Struktur Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. *Jurnal Profita*, Vol. 4 No. 5, pp. 1-16.
- [5] Coller, P., & Gregory. (1999). Audit Comitee Activity and Agency Cost. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 18 No. 4-5, pp. 311-332.
- [6] Farook, S. Z., & Lanis, R. (2005). Banking on Islam? Determinants of CSR Disclosure. *Proceeding International Conference on Islamic Economics and Finance* (pp. 355-388).
- [7] Gujarati, D. (2003). *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- [8] Haniffa, R. (2002). Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective. *Indonesian Management and Accounting Research*, Vol. 1 No. 2, pp. 128-146.
- [9] Haniffa, R., & Cooke, T. E. (2005). The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 24 No. 5, pp. 391-430.
- [10] Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks Via Communication in Annual Reports. *Journal of Business Ethics*, Vol. 76, pp. 97-116.
- [11] Khoirudin, A. (2013). Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2 No. 2, pp. 227-232. <https://doi.org/10.15294/aaj.v2i2.29>.
- [12] Kurniawati, M., & Yaya, R. (2017). Effect of Corporate Governance, Financial Performance and Work Environment Mechanisms on Disclosure of Islamic Social Reporting. *Journal of Accounting and Investment*, Vol. 18 No. 2, pp. 163-171. <https://doi.org/10.18196/180280>.
- [13] Michael C. J., & Meckling, W. H. (1976). A theory of the firm: governance, residual claims and organizational forms, Harvard University Press, December 2000. *Journal of Financial Economics* (JFE), Vol. 3, No. 4, pp. 305-360.
- [14] Nurkhin, A. (2010). Corporate Governance dan Profitabilitas, Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan CSR Sosial Perusahaan. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 2 No. 1, pp. 46-55. <https://doi.org/10.15294/jda.v2i1.1927>.
- [15] Othman, R., & Thani, A. M. (2010). Islamic Social Reporting of Listed Companies in Malaysia. *International Business & Economics Research*, Vol. 9 No. 4, pp. 135-144.
- [16] Othman, R., & Thani, A. M., & Ghani, E. K. (2009). Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah: Approved Companies in Bursa Malaysia. *Research Journal of International Studies*, Vol. 9 No. 12, pp. 4-20.
- [17] Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Statistik Perbankan Syariah 2020. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/>.
- [18] Pratiwi, A., Darmawati., & Amaliyah, Rizky. (2020). Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *El Barka: Journal of Islamic Economic and Business*, Vol. 3 No. 2, pp. 257-281.
- [19] Rachmania, D., & Alviana, N. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Islamic Social Reporting (Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018). *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4 No. 1, pp. 49-55.
- [20] Rama, A. (2014). Analisis Komparatif Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Negara ASEAN. *Laporan Publikasi Nasional*, Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah.
- [21] Ridlo, I. A. (2020). Pandemi COVID-19 dan Tantangan Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia. *INSAN: Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol. 2 No. 5, pp. 155-164.

- [22] Rivandi, M., & Marlina. (2019). Pengaruh Corporate Governance Dalam Memprediksi Biaya Ekuitas Dengan Pendekatan Model Ohlson. *El-Barka: Journal of Islamic Economic and Business*, Vol. 2 No. 2, pp. 222-244. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v2i2.1751>.
- [23] Sudana, I. M., & Arlindania, W. P. A. (2011). Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Go-Public di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, Vol. 4 No. 1, pp. 37-49.
- [24] Sudaryati, D., & Eskadewi, Y. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11 No. 1, pp. 14-28. <http://dx.doi.org/10.31941/jebi.v11i01.172>.
- [25] Sunarto, C. N. (2016). Shariah Governance Dalam Pengungkapan Islamic Social Reporting Index dan Global Reporting Index Pada Perbankan Syariah Periode 2010-2013. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No. 1, pp. 30-57.